

80214

**LAPORAN PENELITIAN**

**SUATU TINJAUAN TERHADAP BUKU MATERI POKOK  
PENDIDIKAN PANCASILA (MKDU 4104)**



**OLEH:**

**Dra. Hernawaty Damanik**

**NIP : 131787137**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**UPB/1 – MEDAN**

**1991**

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. , karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian dengan judul, "Sebuah Tinjauan Terhadap Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila (MKDU 4104) " merupakan hasil penelitian yang disiapkan dalam rangka mengumpulkan KWA (angka kredit) dalam bidang penelitian,disamping itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam bidang penelitian.

Dalam penelitian ini,penulis menghadapi berbagai kesulitan terutama karena kurangnya buku-buku literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian,tetapi berkat bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Bapak Kepala UPRJ - UT Medan, Bapak Drs.Anwar Syah yang telah membimbing penulis dalam pelaksanaan penelitian.
- Bapak Pembantu Rektor I Universitas Terbuka,yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
- Seluruh rekan pegawai di UPRJ-UT Medan yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini

Atas segala bantuan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan mudah-mudahan mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa.

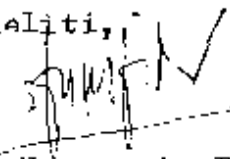
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan baik dari segi metodologinya maupun isi.

Untuk itu dengan senang hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sehat dan membangun.

Akhirnya, semoga saja penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Negeri,      Oktober   1990

Peneliti,



Dra. Hernawaty Damanik

## ABSTRAKSI

Laporan penelitian dengan judul, "Suatu Tinjauan Terhadap Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila (MKDU 4104) " ini, mengemukakan tentang ada tidaknya kesesuaian masing-masing komponen yang merupakan sistematika penulisan modul.

Penulisan modul menjadi begitu penting, karena mahasiswa - Universitas Terbuka yang menggunakan sistem belajar jarak-jauh dituntut untuk mampu menguasai materi belajar dari modul dengan cara belajar mandiri.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan termasuk dalam jenis penelitian evaluasi yang menyangkut isi modul, karenanya dinamakan juga Content Analysis.

Temuan penting dari penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara komponen-komponen penulisan modul yang didasarkan sistematika penulisan, yang telah ditetapkan Universitas Terbuka. Ketidaksesuaian itu meliputi ketidaksesuaian antara tujuan dengan uraian materi dan dengan evaluasi. Ditemukan juga adanya TIK yang materinya tidak diuraikan. Disamping itu jumlah soal test tidak dipengaruhi oleh luasnya uraian materi TIK. Dan belum terlihat sepenuhnya, buku materi pokok Pendidikan Pancasila disusun berdasarkan pada GZFP kurikulum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, sesuai dengan SK Dirjen.DIKTI nomor 25/DIKTI/Kep/1985.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAKSI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
 BAB I : PENDAHULUAN .....	 1
- Latar Belakang .....	1
- Pembatasan Masalah .....	3
- Asumsi Penelitian .....	4
- Kegunaan Penelitian .....	4
- Sistematika Pembahasan .....	4
 BAB II : KERANGKA TEORITIS .....	 6
- Pengertian Modul .....	9
- Langkah-langkah Penyusunan Modul ...	10
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	 13
 BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	 15
- Pembahasan Modul Sesuai Dengan Siste matika Penulisan Yang Telah Ditetap- kan UT .....	15
- Pembahasan Materi Pokok Yang Didasar kan Pada Kurikulum Pendidikan Penda- sila Untuk Perguruan Tinggi .....	41

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....	47
- Kesimpulan .....	47
- Saran-Saran .....	48
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	49

## DAFTAR TABEL

TABEL :	Halaman
I : Modul 1, Kegiatan Belajar 1,2 dan 3.....	21
II : Modul 2, Kegiatan Belajar 1,2 dan 3 .....	24
III : Modul 3, Kegiatan Belajar 1,2,3 dan 4 ...	26
IV : Modul 4, Kegiatan Belajar 1,2,3 dan 4 ...	28
V : Modul 5, Kegiatan Belajar 1 dan 2 .....	30
VI : Modul 6, Kegiatan Belajar 1,2,3 dan 4 ...	32

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Didasari dengan banyaknya lulusan SMA yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi karena kapasitas yang terbatas, pemerintah mendirikan Universitas Terbuka, tepatnya tanggal 04 September 1984 dengan Keputusan Presiden Nomor 41. Uni - versitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia, berbeda dengan perguruan tinggi konvensional lainnya, karena program belajar di UT lebih menekankan kepada prinsip kemandirian.

Kemandirian yang dituntut terhadap mahasiswa UT tidak hanya menyangkut masalah sistem administrasi, tetapi lebih-lebih terhadap penguasaan bahan belajar atau modul. Belajar mandiri memang tidak harus belajar sendiri, tetapi dapat juga dilakukan melalui kelompok belajar, tutorial dan menggunakan media audio visual.

Kemampuan mahasiswa dalam kemendiriannya untuk memahami dan menguasai modul itu sangat menentukan keberhasilan belajar. Dalam hal ini Rektor Universitas Terbuka, Bapak Setijadi menyatakan, "Pada prinsipnya prestasi belajar seorang mahasiswa UT tergantung sekali kepada mahasiswa itu sendiri dalam memahami isi modul". (Setijadi, 1985, hlm. 17).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa penguasaan terhadap modul menduduki fungsi sentral atas keberhasilan mahasiswa, artinya kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menguasai isi



modul merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan pen-  
didikannya di Universitas Terbuka.

Mengingat fungsinya yang demikian utama, modul UT sebagai m-  
materi pokok belajar dirancang dan disusun sedemikian rupa  
untuk memberikan kemudahan mempelajarinya. Disamping itu mo-  
dul disusun berdasarkan sistematika penulisan yang masing-  
masing komponen saling berhubungan, sehingga materi yang di-  
sampaikan dapat dipahami oleh siapa saja yang mempelajari,  
karena materi yang terurai dalam modul memang dimaksudkan  
untuk dipelajari secara mandiri dan memperhatikan aspek in-  
dividual. Dalam hal penulisan modul ini Drs.B.Suryosubroto  
dalam bukunya Sistem Pengajaran dengan Modul menuliskan,  
"Modul ditulis dan disusun sedemikian rupa sehingga bahan  
yang disampaikan dalam kegiatan belajar-mengajar selalu  
terarah kepada tujuan yang ingin dicapai yang telah diru-  
muskan dengan jelas dan khusus". (Drs.B.Suryosubroto, 1983,  
hlm.13).

Beberapa langkah telah ditetapkan untuk ditempuh oleh maha-  
siswa dalam mempelajari modul, diawali dengan rumusan yang  
hendak dicapai, uraian kegiatan belajar-mengajar dan evalu-  
asi. Disamping itu tingkat keberhasilan langsung dapat di-  
ukur persentasenya, setelah mengerjakan test-test unit yang  
ada. Dan hanya kepada mereka yang telah mencapai penguasaan  
lebih besar dari 80 persen yang dibenarkan melanjutkan ke  
pengajaran materi berikutnya. (Modul Universitas Terbuka).  
Mengetahui ketentuan terhadap penguasaan materi modul terda-  
pat sedikit perbedaan dengan pendapat para ahli. "Badan  
Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, menetapkan ketentu

an 75 %, sedangkan Bloom menyarankan 90 %". (Prof. Zahara Idris, S.A., 1981, hlm. 42-43). Dengan demikian hanya mereka yang benar-benar memahami dan menguasai modul dapat segera menyelesaikan pendidikannya di UT.

Kemungkinan apa yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang modul ini lebih jauh. Untuk itu penulis mencoba mengadakan suatu tinjauan terhadap modul IUDU 4104, sebagai buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila.

#### Pembatasan Masalah

Kemandirian mahasiswa merupakan hal utama dalam belajar di UT akan tetapi saat mempelajari modul-modul dari mata kuliah yang diregistrasikan. kedudukan modul yang demikian penting akan berhasil dipelajari, apabila diperhatikan langkah-langkah yang merupakan sistematika pembahasannya.

Penelitian ini akan melihat kesesuaian bagian-bagian yang merupakan sistematika dimaksud, yaitu yang terdapat pada modul Pendidikan Pancasila (IUDU 4104).

Adapun penelitian ini terbatas pada ruang lingkup sebagai berikut :

- Apakah modul disusun sesuai dengan GBPP
- Apakah materi yang diuraikan dalam kegiatan belajar sesuai dengan tujuan pengajaran
- Apakah test-test yang digunakan dalam evaluasi sesuai dengan tujuan.

### Asumsi

Penelitian ini berasumsi pada hal-hal sebagai berikut ;

1. Keberhasilan belajar mahasiswa UT sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami isi modul
2. Penulisan modul buku materi pokok Pendidikan Pancasila berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa dalam mempelajari.
3. Adanya hubungan yang saling mendukung antara langkah - langkah penulisan modul, menunjukkan tiap modul harus di pelajari sesuai dengan urutannya.
4. Tidak sesusian hubungan masing-masing komponen dalam sistematika penulisan modul mempengaruhi hasil kegiatan belajar.

### Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan materi pokok Pendidikan Pancasila (modul MKDU 4104) sesuai dengan garis garis besar program pengajaran dan tujuan yang hendak dicapai.

### Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan pembahasan sebagai berikut ;

1. Menelaah secara keseluruhan buku materi pokok Pendidikan Pancasila (MKDU 4104). Penulis membacanya untuk mendapatkan gambaran sistem penulisan dan pembahasan dari modul pertama sampai akhir.
-

2. Membahas secara terperinci materi masing-masing modul, langkah demi langkah dengan memperhatikan kesesuaian hubungan yang saling mendukung, antara semua komponen
  3. Disamping memperhatikan kesesuaian antara masing-masing komponen juga ditinjau kesesuaian materi dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk tingkat Perguruan Tinggi.
-

## BAB II

### KURANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini yang dibicarakan adalah tentang modul sebagai materi pokok belajar di Universitas Terbuka. Apa sebenarnya pengertian modul itu ? Untuk menjelaskannya perlu merujuk ke beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Sebelumnya penulis akan mencoba melihat latar belakang tentang penggunaannya modul sebagai bahan belajar.

Modul merupakan istilah baru dalam dunia pendidikan, karena baru di penghujung abad XX istilah modul dipakai, bersamaan dengan dilaksanakannya pembaharuan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Mengawali lahirnya istilah modul, Prof. Zahara Idris M. dalam bukunya - *Dasar-Dasar Kependidikan* - mengemukakan bahwa,

Pada tahun 1949 dilaksanakan di Universitas Purdue, Amerika Serikat, mata pelajaran murni yang disusun menjadi beberapa pengajaran murni yang panjangnya ditentukan oleh tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian meluas ke *Combit-Lempletlein* dengan nama yang berbeda-beda, yaitu *Concent CPAC, instro CPAC, Unipac, Package perorangan (individualized learning package)*. Menurut D. Russel (1974) nama yang umum ditemui dalam literatur ialah modul. (Prof. Zahara Idris, M, 1981, hlm. 43 - 44).

Sebagai suatu sistem pelajaran yang masih baru diterapkan dalam dunia pendidikan, modul di Indonesia baru dikenalkan pada tahun 1975, pada saat dilaksanakannya pembaharuan dalam dunia pendidikan melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menunjuk diselenggarakan PPSP itu pada delapan tempat, ".....sejak tahun 1975 sistem pengajaran dengan modul ini dilaksanakan pada PPSP tersebut". (B. Suryosubrata, 1983, hlm. 9).

Penggunaan modul sebagai sistem penyampaian pada delapan tempat FFSF yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan tersebut didasari dengan alasan sebagai berikut :

- a. Modul mempunyai potensi untuk memecahkan masalah pemerataan pendidikan karena modul memungkinkan murid dapat belajar sendiri tanpa tergantung kepada guru sebagai sumber informasi, dan tanpa tergantung kepada tempat dan waktu. Modul dalam arti sistem belajar mengajar yang multi media, dengan demikian akan memungkinkan siswa tanpa harus mengikuti pelajaran di kelas, memungkinkan orang dewasa mengambil program yang sesuai dengan minat dan kepentingannya, tanpa harus mengikuti pelajaran yang mengikat.
- b. Modul mempunyai potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sistem pengajaran dengan modul menekankan bahwa setiap siswa harus dapat mencapai tingkat penguasaan tertentu (mastery learning). Apabila 70 % siswa tidak dapat menguasai tingkat penguasaan minimum, maka modul harus diulang oleh siswa kembali. Bloom menyarankan 90 % dari siswa. Hal ini berarti jaminan mutu pendidikan secara merata dapat dijaga.
- c. Modul mempunyai potensi untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Modul berorientasi kepada tujuan yang telah direncanakan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Modul mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi pendidikan. Modul dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan fasilitas, sebab dengan modul siswa diharapkan dan disarankan belajar selama di sekolah. Modul memungkinkan guru membantu dan memperbaiki siswa selama dia belajar.  
(Prof. Zahara Idris, M., 1981, hlm. 42-43)

Walaupun sistem pengajaran dengan modul baru dikenal dan diterapkan di Indonesia sekitar tahun 1900-an, tetapi Universitas Terbuka sejak awal berdirinya pada tahun 1984 telah memilih modul sebagai salah satu sistem penyampaian materi pokok pengajaran bagi para mahasiswa. Digunakannya modul di UT sangat sesuai dengan sistem belajar mandiri yang me

rupakan ciri belajar jarak jauh, karena menggunakan modul sebagai suatu sistem penyampaian pengajaran memungkinkan mahasiswa untuk belajar sendiri dan menetapkan sendiri waktu belajarnya serta memilih program pengajaran yang cocok sesuai dengan minat dan perkhatiannya. Disamping itu penggunaan modul dalam belajar jarak jauh di UT memungkinkan UT dapat menerima mahasiswa dalam jumlah besar. Hal ini sesuai dengan maksud didirikannya UT, yaitu untuk dapat menampung lulusan SMA yang cukup besar, sedangkan daya tampung Perguruan Tinggi konvensional sangat terbatas. Puku kecil mengenai Universitas Terbuka mengemukakan bahwa :

Tujuan utama UT adalah meningkatkan tingkat partisipasi perguruan tinggi dari 5 % menjadi 8,2 % pada akhir Revolusi IV dan meningkatkan mutu lulusan melalui pengontrolan kualitas bahan belajar. Dalam sistem belajar terbuka ini mahasiswa dituntut lebih banyak berinisiatif untuk belajar sendiri dan berkelompok. (Universitas Terbuka, 1985, hal )

Belajar mandiri dengan menggunakan modul sebagai bahan pelajaran ternyata tidak saja membuat mahasiswa harus aktif dan berdisiplin serta harus melatih dirinya agar senantiasa termotivasi untuk belajar dan menguasai materi dengan baik, tetapi juga mahasiswa dituntut untuk dapat lulus/berhasil dengan baik dan berkualitas. Ini berarti lulusan UT yang menggunakan modul sebagai bahan belajarnya tidak perlu merasa minder, dibanding dengan lulusan Perguruan Tinggi konvensional lainnya, bahkan seharusnya membuat dirinya menjadi bangga.

### Pengertian Modul

Dalam penelitian ini yang dibicarakan adalah tentang modul sebagai materi pokok belajar di Universitas Terbuka. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan modul? Untuk menjelaskan -nya perlu merujuk ke beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli. Dari beberapa referensi yang penulis coba temukan ternyata hanya sedikit yang dapat penulis temukan buku yang mengemukakan tentang pengertian modul ini. Dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan dua pengertian modul yang dikemukakan ahli pendidikan di Indonesia.

Prof. Zakaria Idris MA. dalam bukunya -Dasar-Dasar Kependidikan, mengemukakan pengertian modul sebagai berikut :

Modul ialah suatu satuan program belajar-mengajar yang dapat dipelajari oleh murid dengan bantuan yang sedikit dari pihak guru. Satuan program ini berisikan tujuan yang harus dicapai secara praktis, petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan, materi dan alat-alat yang dibutuhkan, alat penilaian guru mengukur keberhasilan murid dalam mengerjakan. (Prof. Zakaria Idris, MA., 1981, hlm. 44).

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut diketahui adanya petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan dalam mempelajari modul, hal ini akan memudahkan para mahasiswa atau siapa saja yang mempelajarinya untuk menguasai materi modul dengan baik sesuai dengan tujuannya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BRP) Departemen P dan K dalam mengemukakan pengertian modul lebih mempertegas beberapa rincian komponen modul sebagaimana yang dapat dilihat dari rumusan pengertian berikut ini :



Modul adalah suatu unit program belajar-mengajar terkecil yang secara terperinci menggariskan ;

- a. tujuan instruksional yang akan dicapai
- b. topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar-mengajar
- c. pokok-pokok materi yang akan dipelajari
- d. kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas
- e. peranan guru dalam proses belajar-mengajar
- f. alat-alat dan sumber yang akan digunakan
- g. kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dilayati murid secara berurutan
- h. lembar kerja yang harus diisi oleh anak
- i. program evaluasi yang akan dilaksanakan.

(Drs.D.Suryosubroto, 1983, hlm. 17).

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul itu merupakan unit pengajaran terkecil dan lengkap yang menurut rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematis, sehingga memungkinkan siswa/mahasiswa belajar sendiri dalam rangka mencapai tujuan.

#### Langkah-langkah Penyusunan (Penulisan) Modul

Sebagai materi pokok belajar, modul disusun dan dikembangkan berdasarkan suatu konsep yang menekankan pada bagaimana modul itu dapat dipelajari sendiri, oleh seseorang atau dalam hal ini di mahasiswa. Demikian, langkah-langkah yang harus ditertipkan itu jelas, uraian materi belajarnya juga harus sistematis dan logis.

Suatu modul biasanya disusun dan ditulis dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

- I. Menyusun kerangka modul yang terdiri dari ;
  - a. menetapkan (menggariskan) tujuan instruksional umum (TIU) yang akan dicapai dengan mempelajari modul tersebut
  - b. merumuskan tujuan instruksional khusus (TIK) yang merupakan perincian atau pengkhususan dari TIU

- c. menyusun soal-soal penilaian untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan instruksional khusus bisa dicapai
  - d. identifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus
  - e. mengatur/menyusun pokok-pokok materi tersebut di dalam urutan yang logis dan fungsional
  - f. menyusun langkah-langkah kegiatan belajar murid
  - g. memeriksa sejauh mana langkah-langkah kegiatan belajar telah dirancang untuk mencapai semua tujuan yang telah dirumuskan.
- II. Menyusun (menulis) program secara terperinci, meliputi pembuatan semua unsur modul, yakni lembar kegiatan, lembar kerja, lembar jawaban, lembar penilaian dan lembar jawaban test.
- (Drs. B. Suryosubroto, 1983, hlm. 19).

Dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam penulisan suatu modul, akhirnya Universitas Terbuka menetapkan suatu kerangka modul yang terdiri dari :

- 1. Pengantar
- 2. Tujuan Instruksional Umum
- 3. Tujuan Instruksional Khusus
- 4. Kegiatan Belajar (terdiri dari Kegiatan Belajar 1, 2, 3 dan 4)
  - 4.1.1. Uraian dan Contoh
  - 4.1.2. Latihan
  - 4.1.3. Rangkuman
  - 4.1.4. Test Formatif
  - 4.1.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
- 5. Kunci Jawaban Test Formatif.

Perhatikan kerangka penulisan tersebut, jelas terlihat bagaimana hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dimana ternyata pengembangan masing-masing bagian didasari

oleh bagian sebelumnya. Hal ini berarti keterkaitan masing-masing langkah yang ditetapkan tidak dapat dipisahkan, artinya keseluruhan bagian itu merupakan komponen yang saling mendukung. Dengan demikian agar berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini harus memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan itu. Karena keseluruhan langkah tersebut merupakan suatu sistematika yang logis, dimana tiap bagian saling berhubungan dan mendukung.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelaahan terhadap buku materi pokok Pendidikan Pancasila ( Modul MKDU-4104 ) dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, dan pembahasannya meliputi modul 1 sampai 6.

Diseamping itu untuk membantu memahami uraian materi dalam Peningkatan Belajar, dipergunakan buku bacaan lain yang relevan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat kesesuaian masing-masing komponen dalam penulisan modul, berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan Universitas Terbuka. Diseamping itu penelitian ini juga melihat sejauh mana modul MKDU 4104 disusun berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GGPP) Kurikulum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, dengan SK M.26/DIKTI/Kep/1985.

Penelitian ini penulis selengkan dalam penelitian evaluasi walaupun tidak sepenuhnya prinsip-prinsip penelitian evaluasi diterapkan disini. Menurut pada pengertian yang dikemukakan Masri Singarimbun, diketahui bahwa penelitian evaluasi tidaklah harus menciptakan pengetahuan baru, menyusun teori baru dan menguji teori-teori yang sudah ada seperti penelitian dasar. Untuk mengemukakan pengertian penelitian evaluasi, penulis mendapat kesulitan bahan referensi. Dari beberapa buku penelitian, hanya Masri Singarimbun yang secara tegas mengemukakan penelitian evaluasi merupakan salah satu metode penelitian. Menurutnya, yang dimaksud dengan penelitian evaluasi adalah ;

Penelitian yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis, seperti: apa yang merupakan masalah pokok dari suatu masyarakat, apa program yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah itu, bagaimana program itu dapat dilaksanakan, apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan apakah tujuannya tercapai.  
(Masri Singarimbun, 1981, hlm.6).

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa apa yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sejalan dengan pertanyaan apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan apakah tujuannya tercapai. Yang penulis maksudkan dengan program disini adalah penulisan modul. Jadi pertanyaan tersebut dapat diganti dengan-apakah modul telah disusun sebagaimana yang ditetapkan dalam kerangka penulisannya dan apakah tujuannya tercapai. Karena penelitian evaluasi ini menyangkut masalah isi modul dan menganalisa data didasarkan pada apa yang terdapat dalam modul sesuai dengan sistematika penulisan dan BPPF, maka dalam penelitian evaluasi hal ini dapat digolongkan dalam penelitian yang disebut Content Analysis.

Menurut Klaus Krippendorff, "Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from data to their context". (Klaus Krippendorff, 1981, hlm.21).

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa analisis konten merupakan suatu teknik untuk membuat keputusan yang sah berdasarkan data terhadap konteksnya.

#### UAB IV

#### PEMBahasan DAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan bahan materi untuk Pendidikan Pancasila, Modul 4104 penulis melandaskan dalam dua bagian, yaitu :

1. Pembahasan modul secara keseluruhan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan UT.
2. Pembahasan materi pokok yang didasarkan pada kurikulum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

Pada bagian pertama penulis mencoba melihat kesesuaian masing-masing komponen berdasarkan sistematika penulisannya yang telah ditetapkan Universitas Terbuka. Disamping itu khusus uraian dan contoh, penulis akan coba bandingkan dengan buku-buku sumber lain untuk melihat kesesuaiannya. Sedangkan pada bagian kedua, penulis lebih menekankan kesesuaian uraian materi pokok tersebut dengan pokok bahasan Pendidikan Pancasila untuk tingkat Perguruan Tinggi yang termuat dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

1. Pembahasan Modul Sesuai Dengan Sistematika Penulisan Yang Telah Ditetapkan UT.

Bahan materi pokok memuat bahan pengajaran bagi mahasiswa Universitas Terbuka yang berorientasi kemandirian - disusun secara sistematis. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa atau siswa saja dapat mempelajari buku materi pokok UT, disamping itu buku materi pokok UT juga memperhatikan aspek individual, sehingga setiap orang dapat mempelajarinya sendiri.

Pentingnya diperhatikan aspek individual dalam penyusunan

suatu modul dijelaskan oleh B.Suryosubroto yang menurutnya, "Pengusunan Modul pelajaran harus memperhatikan aspek individual agar memungkinkan setiap orang belajar sendiri". - (B.Suryosubroto, 1983, hlm. 20).

Dari berbagai buku materi pokok UT yang ada, penulis menemakan kerangka dalam kerangka penulisannya. Penulisan modul tersebut didasarkan pada suatu sistematika tertentu dimana masing-masing komponen saling berhubungan erat, hal itu menunjukkan bahwa mempelajari modul harus memperhatikan dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan modul UT yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut ;

1. Pengantar
2. Tujuan Instruksional Umum
3. Tujuan Instruksional Khusus
4. Kegiatan Belajar (terdiri dari Kegiatan Belajar 1, 2, 3, dan 4) yang mengandung :
  - 4.1.1. Uraian dan contoh
  - 4.1.2. Latihan
  - 4.1.3. Rangkuman
  - 4.1.4. Test Formatif
  - 4.1.5. Umpan Balik dan Tindak lanjut
5. Kunci Jawaban Test Formatif.

Kerangka penulisan Modul UT tersebut tidak lari dari apa yang dikemukakan Bro. B. Suryosubroto dalam bukunya - Sistem Pembelajaran Dengan Modul - menurutnya suatu modul biasanya disusun dan ditulis dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka modul yang terdiri dari ;
    - a. menetapkan (menggariskan) Tujuan Instruksional Umum
    - b. merumuskan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yang merupakan perincian dari TIU
    - c. menyusun soal-soal penilaian untuk mengukur sejauh mana TIK bisa dicapai
    - d. mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan setiap TIK
    - e. mengatur/menyusun pokok-pokok materi tersebut dalam urutan yang logis dan fungsional
    - f. menyusun langkah-langkah kegiatan belajar murid
    - g. pemeriksaan sejauh mana langkah-langkah kegiatan belajar oleh diarahkan untuk mencapai semua tujuan yang telah dirumuskan.
  2. Menyusun (menulis) program secara terperinci meliputi pembuatan semua unsur modul yakni petunjuk guru, lembar kegiatan murid, lembar kerja murid, lembar jawaban, lembar penilaian (test) dan lembar jawaban test.
- ( Drs. R. Suryosubroto, 1983, hlm. 19 ).

Berdasarkan kerangka penulisan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa masing-masing komponen dikembangkan berdasarkan komponen yang lain. Maka untuk dapat memahami suatu modul, sebaiknya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan secara sistematis tersebut. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana kesesuaian penulisan modul Uf yang didasarkan pada kerangka tersebut di atas.

Dari sistematika penulisan di atas, penulis melihat perlu ditinjau kesesuaian di antara komponen, yaitu ;

- a. antara tujuan yang dirumuskan dengan penilaian
- b. antara tujuan yang dirumuskan dengan uraian materi

Perlu diketahui uraian tentang kedua komponen yang penulis maksudkan.



a. Kesesuaian Antara Tujuan yang Dirumuskan Dengan Penilaian  
 Sebelum melihat apakah ada kesesuaian antara tujuan dengan penilaian, terlebih dahulu harus mengetahui tentang tujuan itu sendiri. Dalam dunia pendidikan dikenal adanya empat (4) macam tujuan yang harus dicapai berdasarkan tingkatannya masing-masing. I.e-empat macam tujuan itu adalah :

1. Tujuan Umum, ialah tujuan pendidikan negara (tujuan - pendidikan nasional).
2. Tujuan Institusional, ialah tujuan untuk setiap lembaga/tingkatan pendidikan, sebagai contoh: untuk SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
3. Tujuan Kurikuler, ialah tujuan untuk setiap bidang studi.
4. Tujuan Instruksional, ialah tujuan setiap judul bidang studi, sebagai contoh di bidang studi ketrampilan, sub-bidang studi pertanian, murid dapat menjelaskan cara mengolah tanah.

(Prof. Kahara Jalis, M.A., 1961, hlm. 48).

Dalam pelaksanaanya ke-empat tujuan itu adalah dalam rangka mencapai tujuan nasional, yang dicapai melalui bidang pendidikan secara bertahap dan bertingkat. Ini berarti apabila tiap-tiap tujuan tercapai, seperti tujuan instruksional, tujuan kurikuler, maupun tujuan institusional itu merupakan sumbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (GBRI). Dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, juga berarti merupakan sumbangan untuk pendidikan bagi tercapainya tujuan nasional.

Dari ke-empat macam tujuan dalam dunia pendidikan itu, yang sebenarnya adalah tujuan instruksional yang juga dikenal dengan istilah tujuan pembelajaran, karena tujuan inilah yang dapat diamati dan diukur melalui tindakan evaluasi.

---

Konurut Drs. Soemarsono, M. sc., yang dimaksud dengan tujuan instruksional adalah, " Tujuan yang menggariskan pengetahuan, kemampuan ketrempilan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang diratiskan dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan diukur ". (Drs. Soemarsono, M. sc., 1978, hlm. 3).

Berdasarkan atas luasnya tujuan yang hendak dicapai, tujuan instruksional ini dibedakan atas dua (2) macam, yaitu:

- a. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
  - b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
- ( DR. Suharsimi Arikunto, 1989, hlm. 129 ).

Perumusan Tujuan Instruksional harus jelas (operasional), karena tujuan inilah yang dapat diukur melalui tindakan evaluasi di akhir kegiatan belajar, dan karena itu pula maka baik guru maupun siswa perlu mengetahui perubahan sikap yang diharapkan akan terjadi pada waktu belajar. Demikian halnya dengan para mahasiswa UT yang mempelajari modul, ia terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami apa tujuan yang harus dicapai setelah mempelajari suatu modul, dengan membaca rumusan TIK yang terdapat di awal suatu modul. Dalam hal ini DR. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, " Pada pelaksanaan sistem baru misalnya pengajaran dengan modul atau sistem yang menggunakan strategi belajar lintas, tujuan instruksional ini sudah diketahui oleh siswa sebelum pelajaran mulai ".

( DR. Suharsimi Arikunto, 1989, hlm. 131 ).

Universitas Terbuka yang menggunakan sistem belajar mandiri mengispirasikan kepada mahasiswa untuk memahami tujuan instruksional sebelum mempelajari modul, karena tujuan inilah yang menjadi penuntun bagi dirinya untuk mengetahui apa yang diharapkan darinya setelah mempelajari suatu modul.

Untuk mengetahui apakah tujuan instruksional telah tercapai atau belum, harus mengukurnya melalui tindakan evaluasi. Dalam penelitian ini yang akan dilihat pengevaluasiannya adalah rumusan yang terdapat dalam tujuan instruksional khusus. Berkaitan dengan hal ini, Sumadi Suryabrata ada mengemukakan bahwa, " Pengukuran dan evaluasi pendidikan pada hakikatnya mengukur dan mengevaluasi seberapa jauh anak didik telah bergerak menuju ke arah tujuan pendidikan itu ". ( Sumadi - Suryabrata, 1989, hlm.43 ). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan gambaran sejauh mana tujuan telah tercapai harus mengukurnya dengan evaluasi. Itulah sebabnya antara tujuan dan evaluasi sangat erat kaitannya. Dalam penelitian ini dicoba mengetahui hubungan itu, dan dalam pelaksanaannya akan terlibat apakah evaluasi di akhir kegiatan belajar itu benar menggambarkan alat ukur bagi tercapainya tujuan. Dengan demikian soal-soal test yang terdapat dalam latihan maupun test formatif harus mencerminkan apa yang diharapkan dalam rumusan tujuan instruksional khusus.

Untuk mengetahui adanya kesamaan antara tujuan dengan penilaian itu dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :

TABEL : I  
MODUL 1 KEGIATAN BELAJAR 1, 2, dan 3

Tujuan Instruksional Khusus	Jumlah halaman uraian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
a. Menerangkan Pengertian Pancasila	8 halaman	1,2,3,4,5,6 (KB1)	1,2,3,4 (KB1)	10	16,67
b. Menerangkan Pengertian nilai, moral, dan sanksi	3 halaman	7,8,9,10 (KB1)	5,6,7,8,9 (KB1)	9	15
c. Menjelaskan metode pendekatan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila.	3 halaman	-	10 (KB1)	1	1,67
d. Menerangkan berbagai fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian dan tujuan yang hendak dicapai dan menerangkan relasi antara dua fungsi utama pandangan hidup bangsa dan dasar negara	3 halaman	1,2,3,4,5,6 (KB2)	1,2,3 (KB2)	9	15
e. Menerangkan latar belakang perlunya P-4 bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	6 halaman	7,8,9,10 (KB2)	4,5,6,7,8,9, 10 (KB 2)	11	18,33
f. Menerangkan proses terbentuknya dan pola pelaksanaan P-4	21 halaman	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 (KB 3)	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 (KB3)	20	33,33

Tujuan Instruksional Khusus	jumlah halaman uraian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
enerangkan pentingnya bagi kita P-4 dalam paya melaksanakan tujuan nasional guna me- ujudkan cita-cita nasional masyarakat adil an makmur.	-	-	-	-	-
Jumlah	44 hlm	30 soal	30 soal	60	100%

Dari tabel I, terlihat bahwa jumlah soal test untuk mengu-  
kur apakah TIK tercapai atau tidak, ternyata tidak sama -  
banyaknya. Bahkan terdapat perbedaan yang sangat besar an-  
tara jumlah soal test yang menyangkut satu TIK dengan TIK  
lainnya. Bandingkan jumlah test yang berkenaan dengan ru-  
musan TIK a = 10 soal (16,67%), TIK c = 1 (1,67%), TIK f = 20  
soal (33,33) atau TIK g = 0 (0%).

Apa yang dimaksudkan di atas menunjukkan bahwa masing-ma-  
sing TIK tidak diukur dengan jumlah soal test yang sama -  
jumlahnya. Disamping itu ternyata luasnya uraian materi  
yang diberikan sesuai dengan TIK yang hendak dicapai, -  
yang ditandai dengan banyaknya jumlah halaman, tidak mempe-  
ngaruhi jumlah test. Rumusan TIK a, yang uraian materinya  
menempati 8 halaman tidak jauh beda jumlah soal testnya -  
dengan TIK b dan d, yang uraian materinya hanya 3 hala-  
man, bahkan dengan TIK e yang 6 halaman. Disamping itu ter-  
dapat terdapat kesamaan soal yang ditanyakan di latihan -  
dan soal test formatif pada TIK a (soal nomor 2) dan pada TIK  
e (soal nomor 9 dan 10).

Dari Tabel I diketahui bahwa rumusan TIK f dibahas lebih  
luas materinya dibanding TIK yang lain, yaitu dalam jumlah  
21 halaman ( 47,73' ), dan dievaluasi dengan jumlah soal -  
terbanyak yaitu 20 soal test ( 33,33' ). Sementara rumusan  
TIK g tidak dibahas dalam uraian materi dan juga tidak ada  
evaluasi yang berkenaan dengan TIK tersebut. Walaupun dem-  
ikian menurut penulis, apa yang diharapkan dalam rumusan TIK  
g sebenarnya telah terkandung dalam uraian TIK e.

Dari Tabel II, dapat dipertegas lagi bahwa luasnya uraian materi untuk mencapai suatu TIK tidak mempengaruhi jumlah soal test dalam mengukur TIK. Bahkan terdapat perbedaan yang sangat besar terhadap jumlah soal test, walaupun jumlah halaman uraian materi adalah sama. TIK b, yang uraian materinya 4 halaman, jumlah soal testnya 14, sedangkan TIK d yang juga diuraikan dalam 4 halaman jumlah soal testnya hanya 9. Hal ini dapat juga dibandingkan dengan TIK c, yang diuraikan dalam 6,5 halaman disusun soal test sejumlah 8-soal, tetapi TIK e yang juga diuraikan dalam 6,5 halaman - disusun soal sebanyak 23.

Perhatikan hal tersebut, dapat dikerukakan bahwa semakin luas suatu uraian materi TIK - yang ditandai dengan banyaknya halaman uraian materi tersebut - bukan berarti semakin banyak pula jumlah soal mengenai materi TIK itu. Hal ini dapat juga dilihat pada modul 1, yang uraian materinya 44 - halaman jumlah soal = 60 , sedangkan modul 2 jumlah halaman uraian materi 26 jumlah soal sebanyak 70.

Dari Tabel II diketahui bahwa TIK e diukur dengan jumlah soal test terbanyak, yaitu 23 soal (32,86%), menyusul TIK a - 16 soal (22,86%), TIK b = 14 soal (20%), TIK d = 9 soal (12,86%), dan yang paling sedikit adalah soal test untuk mengukur TIK c, yaitu 8 soal (11,43%).

Pada Tabel III terdapat perbedaan yang sangat besar, baik antara jumlah soal test terhadap suatu TIK maupun antara jumlah soal test terhadap jumlah halaman uraian materi. TIK a, diukur dengan jumlah soal terbanyak yaitu 20 soal test ( 25% ), menyusul TIK e = 17 soal test ( 21,25% ), TIK f = 15 soal test ( 18,75% ), TIK b = 10 soal test = ( 12,5% ) dan yang paling sedikit adalah TIK c dengan 4 soal test ( 5% ).

TIK-a dengan jumlah soal terbanyak yaitu 20 soal ( 25% ) materinya diuraikan dalam jumlah terbanyak pula, yaitu 10 halaman, ini berarti rata-rata dari 1 halaman dirumuskan 2 soal test. Tetapi pada TIK e yang uraian materinya hanya 3 halaman, disusun soal test sejumlah 17 soal, yang berarti dari 1 halaman rata-rata dirumuskan 6 soal test. Sementara itu TIK c yang diuraikan dalam 6 halaman, soal testnya hanya 4, ini berarti dari 1,5 halaman baru dapat dirumuskan 1 soal test.



TABEL : II  
MODUL 2 KEGIATAN BELAJAR 1,2 dan 3

Tujuan Instruksional Khusus	jumlah halaman ursian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
Dapat menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dan hubungannya satu sama lain	5 halaman	1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 (KB1)	1,2,3,4,5,6 (KB1)	16	22,85
Dapat menjelaskan pokok pikiran yang terdandung dalam Pembukaan UUD 1945	4 halaman	11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20 (KB1)	7,8,9,10 (KB1)	14	20
Dapat menjelaskan sistem Pemerintahan RI	6,5 halaman	1,2,3,4 (KB2)	1,2,3,4 (KB2)	8	11,43
Dapat menjelaskan kepemimpinan nasional lima tahun sebagai mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila	4 halaman	5,6,7,8, (KB2)	5,6,7,8,9 (KB2)	9	12,86
Dapat menjelaskan pentingnya pelaksanaan UUD 1945 secara Iestari dalam kehidupan ber-masyarakat dan bernegara.	6,5 halaman	9,10 (KB2) 1,2,3,4,5,6,7,8 9,10 (KB3)	10 (KB2) 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 (KB3)	23	32,86
Jumlah	26 halaman	40	30	70	100 %

TABEL : III  
MODUL 3 KEGIATAN BELAJAR 1,2,3 dan 4

Tujuan Instruksional Khusus	jumlah halaman uraian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
Dapat menjelaskan Lembaga negara menurut UUD 1945	10 halaman	1,2,3,4,5,6,7,8 9,10(KB1 )	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 (KB1)	20	25
Dapat menjelaskan cara pembentukan lembaga negara tersebut	3 halaman	1,2,3,4 ( KB2 )	1,2,3,4,5, 7, ( KB 2 )	10	12,5
Dapat menjelaskan fungsi dan wewenang lembaga negara	6 halaman	5,6, (KB-2)	6,8 (KB2)	4	5
Dapat menjelaskan cara kerja dan hubungan antar lembaga negara	3,5 halaman	7,8,9,10 (KB2)	9,10 (KB2)	6	7,5
Dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga-negara	3 halaman	1,2,3,4,5,6,7,8 (KB3)	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,(KB3)	17	21,25
Dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945	6 halaman	9,10 (KB3) 1,2,3,4,5,6 (KB4)	10 (KB3) 1,2,3,4,5,6 (KB4)	15	18,75
Dapat menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab	2 halaman	7,8,9,10 (KB4)	7,8,9,10 (KB4)	8	10
<b>j u m l a h</b>	<b>33,5 halaman</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>100 %</b>

TABEL : IV  
MODUL 4 KEGIATAN BELAJAR 1,2,3 dan 4

Tujuan Instruksional Khusus	jumlah halaman uraian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
Dapat menjelaskan tentang GBHN, Pelita dan Repelita dalam mengisi kemerdekaan RI	14 halaman	3,4,5,6,7 ( KB1) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 (KB3) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 (KB4)	2,3,4,5,6,7, 8,10 (KB1) 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10(KB3) 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 (KB4)	53	68,83
Dapat menjelaskan hubungan GBHN dengan UUD-1945 dan dengan Demokrasi Pancasila	2,5 halaman	2 (KB1)	1,9 (KB1)	3	3,89
Dapat menjelaskan tujuan Nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945	5,5 halaman	1 (KB1) 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 (KB2)	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 (KB2)	21	27,26
Dapat melakukan peranan aktif dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan	-	-	-	-	-
Jumlah	22 halaman	27	40	77	100 %

Pada Tabel IV modul 4 ini, rumusan TIK a diukur pencapaiannya dengan jumlah soal terbanyak yaitu 53 soal (68,8%). Rumusan TIK lain yang juga diukur dengan soal test cukup besar adalah TIK-c dengan jumlah soal 21 (27,27%), sementara itu TIK-b hanya diukur dengan soal sebanyak 3 buah. Untuk rumusan TIK-d, ternyata tak satu soalpun yang disusun untuk mengukur pencapaiannya. Hal ini menurut penulis karena tujuan yang diharapkan pada TIK-d menyangkut aspek sikap yang sulit diukur dengan test obyektif. Tetapi walaupun demikian sebaiknya dilakukan suatu modifikasi dari jenis test yang ada, sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari TIK-d, misalnya test obyektif dalam bentuk studi kasus misalnya yang menggambarkan pengetahuan tentang sikap yang diharapkan tujuan, atau jenis test yang menghendaki gambaran sikap seperti essay test atau dengan mengarang misalnya.

Berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya, pada Tabel IV ini, terlihat adanya pengaruh antara luasnya uraian materi TIK - yang ditandai dengan banyaknya halaman uraian materi - dengan jumlah soal test, walau memang belum berimbang benar. Hal ini dapat diketahui dari data yaitu; TIK a = 14 halaman, jumlah soal 53; TIK b = 2,5 halaman, jumlah soal 3 ; dan TIK c = 5,5 halaman, jumlah soal 21.

Pada Tabel IV ini, dapat juga dilihat bahwa ternyata satu TIK dapat saja diukur pada test kegiatan belajar yang berbeda, seperti TIK-a jumlah soal test yang 53 itu, ternyata tersabar soal testnya pada Kegiatan Belajar 1,3 dan 4.

TABEL : V  
 MODEL 5 KEGIATAN BELAJAR 1 dan 2

Tujuan Instruksional Khusus	jumlah halaman uraian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
Dapat menjelaskan dasar pikiran yang menjadi asas Pemilihan Umum	2 halaman	1,2,3,4,5a,9 (KB1)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,20, (KB1)	19,5	32,5
Dapat menjelaskan arti dan tujuan dari Pemilu	2 halaman	5b (KB1) 1,2,6,9,10 (KB2)	15,18,19 (KB1) 4,8,9,10,11,12,13,14,15, (KB2)	17,5	29,17
Dapat menjelaskan asas yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum	2 halaman	6,8 (KB1)	12 (KB1)	3	5
Dapat menjelaskan tentang sistem Pemilihan yang bersifat perwakilan berimbang	1 halaman	7,10 (KB1) 3,4,5,7,8 (KB2)	13,14 (KB1) 1,2,3,5,6,7,16,17,18,19,20, (KB2)	20	33,33
Jumlah	7 halaman	20	40	60	100 %

Pada Tabel V ini, terlihat ketidakseimbangan antara jumlah soal test dengan jumlah halaman uraian materi dibanding dengan tabel-tabel sebelumnya. Sebenarnya uraian materi modul 5 sangat banyak, tetapi yang membicarakan apa yang ingin dicapai oleh TIK hanya sekitar 7 halaman, selebihnya adalah uraian tentang UU nomor 1/1985 tentang Pemilihan Umum, dan UU nomor 2/1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang walaupun ada hubungannya dengan TIK tetapi hal itu bukanlah yang ingin dicapai oleh TIK secara langsung.

Tabel V, memperlihatkan bahwa rumusan TIK-d diukur dengan jumlah test terbanyak, yaitu 20 soal walau hanya diuraikan dalam 1 halaman. Sedangkan TIK-a = 19,5 soal dan TIK b = 17,5 soal, masing-masing diuraikan dalam 2 halaman. Terdapat 0,5 soal, karena soal nomor 5 latihan terdiri dari 5a dan 5b tidak menanyakan untuk mengukur pencapaian TIK yang sama. Soal 5a berisi soal untuk mengukur TIK -a, sedangkan soal 5b berisi soal untuk mengukur TIK-b.

Walaupun antara TIK a, b dan c terlihat adanya keseimbangan dalam pengukuran pencapaiannya berdasarkan jumlah soal test yang tidak jauh berbeda, tetapi terhadap TIK c jauh sekali perbedaannya, yaitu hanya diukur melalui 3 soal test (X), sedangkan jumlah halaman uraian materi tujuan adalah sama dengan TIK a dan TIK b.

TABEL : VI  
MODUL 6 KEGIATAN BELAJAR 1,2,3,dan 4

Tujuan Instruksional Khusus	jumlah halaman uraian materi	nomor soal Latihan	nomor soal Formatif	Jumlah	%
Capat menerangkan pengertian politik dan politik nasional	2 halaman	5 (KB1)	4 (KB1)	2	2,47
Capat menerangkan pembangunan sistem politik	2 halaman	1,2 (KB1)	2,3 (KB1)	4	4,94
Capat menerangkan posisi pembangunan bidang politik dalam pembangunan nasional	3 halaman	4,7 (KB1)	1,6 (KB1)	4	4,94
Capat menerangkan kebijaksanaan pembangunan politik dalam negeri.	2 halaman	3,6,8 (KB1)	5,(KB1)	4	4,94
Capat menerangkan mekanisme pembuatan undang undang bidang Politik II ( kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan referendum )	30,5 hlm	9,10,11 (KB1)  1 <sup>s</sup> /d 10 (KB2) 1 <sup>s</sup> /d 10 (KB3) 1 <sup>s</sup> /d 10 (KB4)	7,8,9,10 (KB 1)  1 <sup>s</sup> /d10 (KB2) 1 <sup>s</sup> /d10 (KB3) 1 <sup>s</sup> /d 10 (KB4)	67	82,71
Jumlah	40,5 hlm	41	40	81	100 %

Pada Tabel IV , diketahui dari 81 soal test pada modul 6 sebanyak 67 soal (82,71%) terpusat pada soal yang menyangkut TIK e, selebihnya tersebar pada TIK a sebanyak 2 soal, TIK b sebanyak 4 soal, dan TIK d sebanyak 4 soal.

Besarnya jumlah soal untuk mengukur pencapaian TIK e, karena apa yang terdapat pada Kegiatan Belajar 1,2,3 dan 4-modul6 sebahagian besar merupakan uraian materi TIK e. Bahkan Kegiatan Belajar 2,3 dan 4 secara keseluruhan berisi uraian materi TIK e, yaitu mengenai kekuatan sosial politik (Kegiatan Belajar 2), organisasi kemasyarakatan (Kegiatan Belajar 3) dan referendum (Kegiatan Belajar 4).

Dengan sendirinya test evaluasi pada modul 6 ini lebih banyak menyangkut soal pencapaian TIK e. Tetapi yang khusus menerangkan TIK e, yaitu menerangkan mekanisme pembuatan Undang-undang bidang Politik II sebenarnya hanya 7 soal - test saja ( 8,64% ), yaitu test pada Kegiatan Belajar 1 - sedangkan selebihnya yaitu soal test Kegiatan Belajar 2,3 dan 4 sudah menyangkut materi dari Undang-undang bidang - Politik II itu sendiri. Hal ini terlalu luas dari apa yang ingin dicapai melalui TIK e. Sebenarnya TIK yang terlalu luas kurang baik dan sulit diukur. Dan sebaiknya rumusan TIK dibuat dalam bahasa yang operasional dan spesifik.



b. Kesesuaian Antara Tujuan Yang Dirumuskan Dengan Uraian Materi

Tujuan Instruksional yang dirumuskan di awal suatu modul - harus dicapai. Dan apa yang ingin diharapkan oleh tujuan - itu agar dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan ha - rus diuraikan secara jelas dalam materi pelajaran. Luas - dan dalamnya materi tujuan itu ditentukan oleh tujuan.

Dalam modul, materi tujuan itu diuraikan pada bagian kegi - atan belajar. Buku materi pokok Pendidikan Pancasila (IKDU 4104) terdiri dari 6 modul, yaitu modul 1 hingga modul 6 - dan pada setiap modul terdapat kegiatan belajar yang terdi - ri dari Kegiatan Belajar 1,2,3 dan 4. Dalam kegiatan bela - jer ini, selain mengemukakan uraian dan contoh, juga memuat soal latihan, rangkuman dan test formatif.

Uraian dan contoh yang merupakan jabaran dari materi penga - jaran yang terkandung dalam tujuan itu merupakan cerminan dari isi tujuan itu sendiri. Dengan demikian tidak boleh - terjadi uraian dan contoh dalam kegiatan belajar isinya - menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam tujuan.

Dalam kenyataannya terdapat rumusan tujuan yang terlalu lu - as dibanding tujuan lainnya. Ini berpengaruh terhadap luas - nya pembahasan materi yang di dalam modul ditandai dengan banyaknya jumlah halaman uraian materi. Menurut Prof.Zahara Idris,M.A. tujuan yang baik adalah, " Tujuan yang rumusannya bersifat spesifik dan menggunakan bahasa yang operasi - onal dalam bentuk kemampuan atau tingkah laku sehingga mu - dah diukur ". (Prof.Zahara Idris,M.A.,1981,blm.49).

Pada modul Pendidikan Pancasila (MKDU 4104), penulis menemukan adanya tujuan instruksional yang tidak diuraikan dalam Kegiatan Belajar. Disamping itu ada kalanya uraian dan contoh materinya tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dan diharapkan oleh tujuan. Untuk lebih jelasnya perhatikan pembahasan masing-masing modul berikut ini.

#### Modul 1

Pada modul pertama ini, Tujuan Instruksional Khusus (TIK) - g tidak ada dibahas materinya secara terurai dalam kegiatan belajar. Walaupun demikian apabila diperhatikan lebih lanjut, apa yang ingin dicapai oleh TIK-g sebenarnya hanya dapat tercapai apabila TIK e dan TIK f telah tercapai, karena secara tidak langsung materinya ada terurai dalam TIK f, yaitu uraian Pancasila sebagai moral pembangunan, yang merupakan salah satu Pola Pelaksanaan P-4.

Mengenai uraian TIK a, penjelasan pengertian Pancasila dikemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila - telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, tetapi dalam penjelasan hanya sila pertama dan ketiga saja yang dikemukakan, padahal diketahui Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, karena itu alangkah baiknya bila ke-lima sila tersebut diterangkan satu persatu, paling tidak ditambahkan untuk sila kelima, karena secara material - sila kelima juga memerlukan keterangan lebih lanjut, bahkan sangat penting mengingat kata Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai konotasi kekinian.

Untuk memperkeysa penjelasan materi TIK a, perhatikan buku Pengertian Pancasila - (Pidato Pringatan Lahirnya Pancasila tanggal 01 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta) - oleh DR.Moh.Hatte,Penerbit PT.Inti Idayu Press, 1978.

Sementara itu apa yang diharapkan dari TIK d , menurut penulis tujuannya terlalu luas. Tetapi kenyataannya uraian materi TIK d hanya 3 halaman, dan porsi pembahasan terhadap dua fungsi utama Pancasila yaitu, sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara terlalu sedikit dan sederhana. Melihat fungsinya yang utama seharusnya kedua-dua tersebut dibahas lebih mendalam agar fungsi pokok dari pada Pancasila itu lebih jelas, dan para mahasiswa dapat membedakan kedua fungsi utama tersebut dengan fungsi lainnya. ( Perhatikan ; Santiaji Pancasila,hlm.15 - 21 , oleh Darji Darmodiharjo. dan Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, hlm. 10 - 16, CSIS ).

## Modul 2

Pada modul 2, semua TIK materinya diuraikan dalam Kegiatan Belajar 1,2 dan 3. Jumlah halaman uraian materinya tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing TIK diuraikan dalam 4 - 6,5 halaman. Perlu penulis tambahkan bahwa untuk TIK a, yang menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dan hubungannya satu sama lain,perlu dikemukakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan masing-masing sila - dari Pancasila, agar lebih terlihat hubungan yang lebih nyata.

Uraian materi TIK e, penulis ingin tambahkan yaitu mengenai pelestarian UUD 1945. Sebelum dibicarakan upaya pelestarian UUD 1945, perlu dijelaskan apa yang akan dilestarikan. Prof.DR.M.Solly Lubis,SH. menyatakan, " Ada tiga aspek yang harus dilestarikan, yaitu aspek filosofis, berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip (azas), aspek struktural berupa sistem pemerintahan dan aspek politis yakni tujuan negara ". Disamping itu dalam upaya pelestarian UUD 1945 dapat ditinjau dari dua usaha, yaitu " Secara konseptual melalui perumusan garis politik kebijaksanaan pemerintah dan melalui perundang-undangan dan secara operasional - yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dan administrasi negara kita dan juga melalui kehidupan masyarakat sehari-hari ". (Prof.DR.M.Solly Lubis,SH.,1985,hlm.310 - 318).

### Modul 3

Pada modul 3 ini apa yang ingin dicapai oleh TIK, materinya sudah diuraikan dengan baik dalam Kegiatan Belajar 1,2,3 - dan 4. Dari keseluruhan TIK modul 3, uraian materi terbanyak adalah TIK a yang materinya diuraikan dalam keseluruhan Kegiatan Belajar 1 sebanyak 10 halaman. Banyaknya pembahasan tampak seimbang pada masing-masing TIK yang ingin dicapai, walaupun jumlah halaman uraian materi tidak sama.

### Modul 4

Dalam modul 4 ini, uraian materi TIK tidak dibahas secara-

berurutan. TIK a materinya dibahas dalam Kegiatan Belajar 3 dan 4, sedangkan TIK b materinya dijelaskan pada Kegiatan Belajar 1, serta TIK c materinya diuraikan pada Kegiatan Belajar 2.

Dari keempat rumusan TIK pada modul 4, terlihat bahwa TIK-d, tidak diuraikan materinya dalam kegiatan belajar. Rumusan TIK d menyangkut aspek afektif yang sulit mengukurnya -- melalui test obyektif. Memperhatikan rumusan TIK d lebih lanjut, menurut penulis apa yang ingin dicapai hanya dapat diraih apabila mahasiswa telah mencapai TIK a, b dan c. Dengan kata lain, keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan dari TIK a, b dan c akan mewujudkan dalam apa yang ingin dicapai oleh TIK d.

Sementara itu rumusan TIK a, terlalu luas tujuannya dan ini mempengaruhi luasnya uraian materi. Dari 22 halaman uraian materi modul 4, sejumlah 16 halaman ( 63,64 %) menguraikan materi TIK a yang meliputi Kegiatan Belajar 3 dan 4.

#### Modul 5

Pada modul 5, ada empat TIK yang ingin dicapai. Keempat rumusan tujuan tersebut diuraikan dalam kegiatan belajar 1 dan 2 pada sebanyak 7 halaman, termasuk yang terdapat pada penjelasan UU nomor 1 tahun 1985 tentang Pemilihan Umum.

Uraian materi TIK pada modul 5 dapat dikatakan beraifat umum, dan tidak dilakukan pembahasan secara luas dan mendalam. Dari uraian yang demikian singkat itu dapat disimpulkan

soal test sebanyak 60 soal, yaitu 20 soal terdapat di latihan dan 40 soal pada test formatif. Walaupun uraian materi pada modul 5 ini sangat ringkas, tetapi modul 5 ini dilengkapi dengan materi pendukung yang berkenaan dengan tujuan, yaitu UU nomor 1 tahun 1985 tentang Pemilihan Umum dan UU nomor 2 tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang merupakan materi Kegiatan Belajar 2 . Disamping itu modul 5 ini dilengkapi pula dengan 4 lampiran, yaitu ;

Lampiran 1 : TAP MPR - RI NO.I/MPR/1983, tentang Peraturan Tata Tertib MPR

Lampiran 2 : Politik, Aparatur Pemerintahan, Hukum Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri.

Lampiran 3 : TAP MPR - RI NO.III/MPR/1983, tentang Pemilihan Umum

Lampiran 4 : TAP MPR - RI NO.IV/MPR/1983 tentang Referendum

Mengingat singkatnya uraian materi pada modul 5 ini, maka perlu diadakan penambahan. Untuk itu dapat diperkaya dengan memperhatikan buku - Sistem Pemerintahan Indonesia, oleh Drs.C.S.T.Kansil,SH.

## Modul 6

Pada modul 6 ini, terdapat 5 rumusan tujuan yang ingin dicapai dan materinya diuraikan dalam 4 Kegiatan Belajar, tetapi apa yang ingin dicapai dalam rumusan TIK a, b, c dan d

serta e hanya termuat pada Kegiatan Belajar 1, selebihnya Kegiatan Belajar 2,3 dan 4 memuat materi pelengkap TIK e. Rumusan TIK e , sebenarnya hanya ingin menerangkan mekanisme pembuatan Undang-undang bidang Politik II, dan materinya telah diuraikan di bagian akhir Kegiatan Belajar 1. Jadi materi yang terurai pada Kegiatan Belajar 2,3 dan 4 tidak berkenaan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelima TIK pada modul 6 . Adapun uraian materi yang terdapat pada Kegiatan Belajar 2,3 dan 4 sebenarnya merupakan isi dari Undang-undang bidang Politik II, yang meliputi Kekuatan Sosial<sup>1</sup> Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Referendum. Dengan demikian TIK e, yang bertujuan menerangkan mekanisme pembuatan UU bidang Politik II, hanya dibahas pada Kegiatan Belajar 1. Ini berarti keseluruhan yang ingin dicapai oleh TIK pada modul 5 hanya diuraikan materinya pada Kegiatan Belajar 1.

## 2. Pembahasan Materi Pokok Yang Didasarkan Pada Kurikulum Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baru dikenal sejak tahun 1973, Sebelumnya di sekolah-sekolah diajarkan Pendidikan - Kewargaan Negara yang menekankan pada pengetahuan sejarah dan Hukum Tata Negara. Pada tahun 1973, melalui Ketetapan MPR - RI NO.IV/MPR/1973, tentang Garis-Garis Besar Haluan-Negara ( GBHN ) ditegaskan bahwa Pendidikan Moral Pancasila dimasukkan dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Sejak saat itulah Pendidikan Moral - Pancasila dijadikan sebagai salah satu bidang studi tersendiri.

Pendidikan Pancasila pada hakikatnya adalah pendidikan moral yang bersumber dan berlandaskan Pancasila, karena itu peneknannya lebih dititik beratkan pada aspek moral (afektif) dan perbuatan (psikomotor) disamping secara integratif perlu diperhatikan aspek pengetahuan (kognitif).

Pada tahun 1978 terjadi perubahan terhadap materi Pendidikan Pancasila, yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR — Nomor 11/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Berdasarkan hal itu, kemudian diadakan reorganisasi materi kurikulum Pendidikan Moral Pancasila yang isinya disesuaikan dengan P-4, dengan berdasarkan Surat Edaran Dirjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 0377/C/1978. Adanya reorganisasi tersebut, memperbaharui -



materi Pendidikan Pancasila yang disesuaikan dengan P-4 - dan berorientasi langsung pada nilai-nilai Pancasila. Untuk tingkat perguruan tinggi, reorganisasi materi pengajarannya dilaksanakan pada tahun 1985, berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 25/DIKTI/Kep/1985.

Pada pembahasan buku materi pokok UT yang menyangkut materi pengajaran, dalam hal ini disesuaikan dengan pokok bahasan yang berdasarkan kurikulum sesuai dengan SK DIKTI - tersebut. Berdasarkan hal itu diketahui bahwa materi pokok bahasan Pendidikan Pancasila yang terdapat dalam modul MKDU 4104, ternyata tidak disusun berdasarkan pokok bahasan yang sesuai dengan kurikulum yang telah diatur berdasarkan SK Dirjen DIKTI nomor 25 tahun 1985 tersebut.

Dari pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa ada beberapa pokok bahasan yang merupakan isi kurikulum, tetapi materinya tidak dibicarakan dan dibahas dalam uraian materi pada modul MKDU 4104. Disamping itu pembahasan terhadap materi yang sesuai dengan SK DIKTI yang terdapat dalam modul MKDU 4104 tidak dilakukan secara berurutan, mulai pokok bahasan nomor 1.1.1. hingga 4.1.1.. Dan pembahasan materi pokok yang sesuai juga hanya merupakan salah satu uraian dari satu modul yang terdapat pada Kegiatan Belajar 1, 2, 3 atau 4. Jadi tidak merupakan satu uraian dari satu pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang berdiri sendiri, yang dibahas secara luas dan mendalam.

Pada buku materi pokok - Pendidikan Pancasila- Universitas Terbuka, cetakan ketiga, Juli 1986, upaya menyesuaikan mate-

ri modul dengan kurikulum, telah diadakan penyempurnaan , dengan menambahkan tiga materi pelengkap yang terdapat pada akhir modul 3. Ketiga materi pelengkap itu masing-masing menyangkut pokok bahasan sebagai berikut ;

- Materi pelengkap untuk modul 1, tentang Pokok Bahasan 2.1.1. Filsafat Pancasila
- Materi pelengkap untuk modul 2, tentang Sub Pokok Bahasan 3.1.1.4. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945.
- Materi pelengkap untuk modul 3, tentang Sub Pokok Bahasan 3.1.1.7. Hak dan Kewajiban asasi warga negara RI menurut Pancasila.

Setelah diadakan pembahasan mengenai materi pokok yang didasarkan pada kurikulum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi , berdasarkan SK DIKTI no.25 tahun 1985 tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

#### SK DIKTI 1985

Pokok Bahasan	M a t e r i
1.1.1. Hakikat Pancasila 1.1.1.1. Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa 1.1.1.2. Pancasila sebagai dasar negara RI	Ada. Dikemukakan dalam kegiatan belajar 2 ,bersama dengan fungsi Pancasila yang lain . Pembahasan kurang luas dan dalam
2.1.1. Filsafat Pancasila 2.1.1.1. Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional	A d a . Dikemukakan dalam materi pelengkap modul 1, halaman 177 - 184.

## Pokok Bahasan

- |  |  |
|--|--|
| <p>2.1.1.1. <u>Pandangan integratif dalam filsafat Pancasila</u></p> <p>2.2.1. <u>Nilai-nilai Pancasila</u></p> <p>2.2.1.1. <u>Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa</u></p> <p>2.2.1.2. <u>Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab</u></p> <p>2.2.1.3. <u>Nilai-nilai Persatuan Indonesia</u></p> <p>2.2.1.4. <u>Nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan</u></p> <p>2.2.1.5. <u>Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</u></p> <p>2.3.1. <u>Pendalaman Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).</u></p> <p>2.4.1. <u>Latihan menganalisis masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan Pancasila</u></p> | <p>Dikemukakan dalam materi lengkap modul 1.</p> <p>A d a.</p> <p>Dikemukakan pada Kegiatan Belajar 1, halaman 5 - 9.</p> <p>Sebagai persujudan nilai-nilai tersebut dituangkan pada butir-butir pengamalan Pancasila yang termuat dalam P-4, hal ini tertulis dalam Kegiatan Belajar 3, halaman 47 - 49.</p> <p>A d a.</p> <p>Dibahas pada Kegiatan Belajar 3, halaman 36 - 56.</p> <p>Tidak ada, tetapi untuk dapat melaksanakannya, pada Kegiatan Belajar 1 ada dikemukakan pen</p> |
|--|--|

2.4.2. Latihan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kasus-kasus kehidupan.

3.1.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

3.1.1.1. Pengesahan Dasar Negara dan UUD 1945

3.1.1.2. Hubungan Pancasila dan UUD 1945

3.1.1.3. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD<sup>1945</sup>

3.1.1.4. Prinsip-Prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945

3.1.1.5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

3.1.1.6. Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen

3.1.1.7. Hak dan Kewajiban azasi WN RI menurut Pancasila

dekatan untuk Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Tidak ada.

Ada, tetapi sangat singkat pada KB 1 halaman 68, perlu ditambahkan sajarah perumusannya.

Ada, pada KB 1 halaman 70 - 72

Ada, pada KB 1, halaman 75 - 76

Ada. Dibicarakan pada materi Pelengkap modul 2, halaman 190 - 191.

Ada, pada KB 2-halaman 86 - 92

Tidak ada.

Ada, tetapi secara singkat pada KB 3 halaman 153 dan pada KB 4 halaman 158 - 164

3.2.1.Latihan menganalisis pelaksanaan UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan RI	
3.2.1.1.UUD 1945 dalam gerak pelaksanaan	Tidak ada.
3.2.1.2.Latihan menganalisis kasus-kasus ketatanegaraan	Tidak ada.
4.1.1.GBHN dan Repelita	
4.1.1.1.Hubungan UUD 1945 dengan GBHN	Ada,pada Kegiatan Belajar 1, modul 4, halaman 2
4.1.1.2.Tujuan Nasional dan Tujuan Pembangunan Nasional dalam cita-cita Indonesia	Ada,pada Kegiatan Belajar 2, halaman 7
4.1.1.3.Sola Umum Pembangunan Nasional	Ada,dikemukakan pada Kegiatan Belajar 2,3 dan 4.
4.1.1.4.Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)	Ada,pada Kegiatan Belajar 4
4.1.2.Latihan menganalisis pelaksanaan Pembangunan di Daerah	Tidak ada.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan Penelitian

Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan beberapa rumusan Tujuan Instruksional Mahasiswa (TUM) yang materinya tidak diuraikan dalam Kegiatan Belajar, dan TIK yang materinya tidak diuraikan ini tidak diukur penguasaannya melalui latihan maupun test formatif.
- b. Asing-asing TIK tidak diukur dengan soal test yang sama jumlahnya. Dan banyaknya soal test evaluasi tidak ditentukan oleh luasnya uraian materi TIK yang ditandai dengan banyaknya jumlah halaman uraian materi.
- c. Masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dengan uraian materi, dimana uraian dan contoh materi yang dikemukakan tidak sesuai/kurang tepat dengan apa yang ingin dicapai dan diharapkan oleh tujuan.
- d. Penulisan buku materi pokok Pendidikan Pancasila (Modul IEDU-1/10) masih belum sepenuhnya didasarkan pada GBPP Kurikulum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, sesuai SK Dirjen Dikti no. 25/ Dikti/Kep/1985. Hal ini terlihat karena masih ada beberapa pokok bahasan yang materinya tidak diuraikan dalam modul, dan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum tersebut telah disediakan materi pelengkap untuk modul 1, 2 dan 3.

- e. Sesuai dengan penulisan buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila (Modul MKDU-4104) telah disusun sesuai dengan sistematika penulisan modul, tetapi isi materi modul masih perlu ditinjau kembali/disempurnakan.

## 2. Saran-saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan/perbaikan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan, dalam bidang ini untuk mencapai lebih jauh tentang penulisan modul, khususnya Modul Pendidikan Pancasila (Modul MKDU-4104).
- b. Buku Materi dan contoh serta evaluasi yang terdapat dalam Buku Bahan Belajar hendaknya benar-benar mencerminkan isi dari tujuan yang hendak dicapai.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila (Modul MKDU 4104), belum sepenuhnya didasarkan pada kurikulum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi sesuai dengan SK Dirjen DIKPTI no.25 Tahun 1986, karena Modul MKDU-4104 perlu diadakan penyempurnaan/revisi.

#### DAFTAR KEFUSTAKAAN

- Anshari, Drs. H. M. Hafi, 1983, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya : Usaha Nasional.
- Arikunto, Dr. Suharsimi, 1989, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : P.T. Bina Aksara.
- CSIS, 1976, Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila, Jakarta : Yayasan Proklamasi.
- Darmodiharjo, SH, Prof. Darji, (dkk), 1981, Santiaji Pancasila, Surabaya : Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Mengenal Universitas Terbuka Program Diploma, S1 dan Akta V, Jakarta : Universitas - Terbuka.
- Natta, Moh. DR., 1978, Pengertian Pancasila (Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta), Jakarta : P.T. Inti Idayu Press.
- Idris, MA., Prof., Zahara, 1981, Dasar-Dasar Kependidikan, Padang : Penerbit Angkasa Raya.
- Kancil, SU., Drs., CST., 1985, Pancasila dan UUD 1945, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Krippendorff, Klaus, 1981, Content Analysis, An Introduction to Its Methodology, London : Sage Publications, Beverly Hills.



Lubis, Prof., DR., M. Solly, 1985, Pembahasan UUD 1945, Bandung :  
Penerbit Alumni.

Singarimbun, Masri, dan Sofian, Effendi (Penyunting), 1984, Me-  
tode Penelitian Survei, Jakarta :  
LPJES.

Suntjojo, 1984, P-4 dan UUD 1945 Dalam Bagan, Bahan Referen-  
si untuk Penataran P-4, Jakarta;:  
C.V. Indiana.

Suryosubroto, Drs., B., 1983, Sistem Pengajaran dengan Modul,  
Jakarta : PT. Bina Aksara.